



**PERKEMBANGAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(RUANG LINGKUP PENETAPAN TERSANGKA) STUDY
KASUS PERKARA NOMOR. 22/PID.PRAP/2017/PN.
JAKSEL ATAS NAMA PAHALA
TUA, SOS, MM**

TESIS

ENDI SULISTIYO

1520922071

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

2018



**PERKEMBANGAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(RUANG LINGKUP PENETAPAN TERSANGKA) STUDY
KASUS PERKARA NOMOR. 22/PID.PRAP/2017/PN.
JAKSEL ATAS NAMA PAHALA
TUA, SOS, MM**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

ENDI SULISTIYO

1520922071

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Endi Sulistiyo
NRP : 1520922071
Tanggal : 08 Januari 2018

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 08 Januari 2018.

Yang Menyatakan,


(Endi Sulistiyo)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endi Sulistiyo
NRP : 1520922071
Program Studi : Magister Hmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royaiti Non-eksklusif (*Non-Exslusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perkembangan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Ruang Lingkup Penetapan Tersangka) Study Kasus Perkara Nomor. 22/Pid.Prap/2017/Pn. Jaksel Atas Nama Pahala Tua, Sos, Mm

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royaiti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Januari 2018.

Yang menyatakan,


(Endi Sulistiyo)


PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Endi Sulistiyo
NRP : 1520922071
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : **Perkembangan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Ruang Lingkup Penetapan Tersangka) Study Kasus Perkara Nomor. 22/Pid.Prap/2017/Pn. Jaksel Atas Nama Pahala Tua, Sos, MM**


Telah Berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dr. Muhammad Arafah Sinjair, SH, M. Hum
Ketua Penguji


Dr. Erni Agustina, SH, SpN
Penguji / Pembimbing I


Dr. Muhammad Hatta, SH, MH
Penguji / Pembimbing II


Dwi Desi Yavi Tarina, SH, MH
Dekan


Dr. Erni Agustina, SH, SpN
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 08 Januari 2018

**PERKEMBANGAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (RUANG LINGKUP PENETAPAN
TERSANGKA) STUDY KASUS PERKARA
NOMOR. 22/PID.PRAP/2017/PN. JAKSEL
ATAS NAMA PAHALA TUA, SOS, MM**

ENDI SULISTIYO

ABSTRAK

Perkembangan lembaga praperadilan khusus untuk penetapan tersangka adalah merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya mempunyai motivasi atau tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari tersangka. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai pengawasan yang bertujuan agar penegak hukum khususnya para penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Penuntut Umum Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berbuat dan bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa ditingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, ataupun lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan penggunaan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, disamping itu pengajuan lembaga praperadilan ini merupakan penegakan hukum dalam mencari dan melaksanakan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap putusan-putusan praperadilan baik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 yang telah memperluas objek Praperadilan yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi selain itu juga untuk memformulasikan bentuk-bentuk 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik, baik Penyidik KPK, Kejaksaan dan Polri sehingga 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dapat diterima oleh Hakim praperadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui Arus gelombang praperadilan merupakan cara baru dalam proses penegakan hukum yang berdampak pada dua sisi, disatu sisi sebagai kontrol dan intropeksi atas penyimpangan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum sedangkan disisi lain sebagai upaya tersangka menghindari dari pemeriksaan pokoknya, oleh karena itu diharapkan para penegak hukum khususnya penyidik Kejaksaan dapat mempersiapkan diri melalui terobosan-terobosan hukum sepanjang terobosan hukum itu tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima oleh Hakim Praperadilan. Saat ini perkara Pahala Tua, Sos, MM, perkara pokoknya sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.

Kata Kunci : Korupsi, Penegakan Hukum, dan Praperadilan.

**DEVELOPMENT OF PREVENTION OF CRIMINAL ACTIONS
OF CORRUPTION (SCOPE OF SUSPECTED APPROPRIATION)
CASE STUDY NUMBER 22 / PID.PRAP / 2017 / PN.
JAKSEL THE NAME OF PAHALA
TUA, SOS, MM**

ENDI SULISTIYO

ABSTRACT

The development of pretrial institutions specifically for the determination of suspects is a new thing in the life of criminal law enforcement in Indonesia, of course have a certain motivation or purpose that is to protect the legal interests of the suspect. Pretrial institutions serve as supervisors with a view to enforcing law enforcement, especially the investigators of the Police, Attorney and Corruption Commission or Prosecutor General Prosecutor and Corruption Eradication Commission does not act and act arbitrarily against suspects or defendants at investigation and prosecution, or pretrial institutions are to the interest of the use of the protection of the rights of suspects or defendants, in addition to this pre-trial pretrial application is a law enforcement in seeking and implementing legal certainty that is related to justice and truth. The purpose of this study was to identify and analyze pretrial decisions well before the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 dated 25 April 2015 which has expanded the object of Pretrial namely the determination of suspects, searches and seizures and after the decision of the Constitutional Court and also to formulate 2 (two) forms of evidence in the determination of suspects conducted by the Investigator, both the Provider of KPK, the Attorney and the Police, so that 2 (two) evidences to determine if a suspect can be accepted by the Pretrial Judge. The method used in this study is normative juridical, used to examine / analyze data in the form of legal materials, especially primary materials and secondary materials. The conclusion of the results of this study is known Pretrial wave is a new way in the law enforcement process that impact on two sides, on the one hand as a control and introspection of the irregularities of the act of forced attempts by law enforcers while on the other hand as a suspect attempt to avoid the principal examination, by because it is expected that law enforcers, especially prosecutors investigators can prepare themselves through legal breakthroughs as long as the law breakthrough is not contrary to the law and can be accepted by the Judge of Pretrial. Currently, Pahala Tua case, Sos, MM, the main case is running in the Corruption Court in Jakarta.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, and Pretrial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: " Perkembangan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Ruang Lingkup Penetapan Tersangka) Study Kasus Perkara Nomor. 22/Pid.Prap/2017/Pn. Jaksel Atas Nama Pahala Tua, Sos, MM ".

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj, MSc, Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta.
3. Dr. Erni Agustina, SH, S.p N selaku Ketua Program Magister Hukum Hukum sekaligus selaku Pembimbing I, yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. Mohamad Hatta, SH,. MH, selaku Pembimbing II.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di Kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 08 Januari 2018.

(Endi Sulistiyo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	8
I.3. Pembatasan Masalah	8
I.4. Tujuan Penelitian	9
I.5. Manfaat Penelitian	9
1.5.1. Secara Teoritis	9
1.5.2. Secara Praktis	9
I.6. Kerangka Teoritis	10
I.7. Metode Penelitian	14
1.7.1 Pendekatan Penelitian	14
1.7.2 Sifat Penelitian	14
1.7.3 Obyek Penelitian	15
1.7.4 Jenis dan Sumber data	15
1.7.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
II.1. Kekuasaan Kehakiman	18
II.2. Kemandirian Hakim	22
II.3. Negara Hukum	24
II. 4. Asas Legalitas	31
II.5. Sistim Peradilan Pidana Indonesia	34
A.. Kepolisian	34
B.. Kejaksaan.....	35
C. . Pengadilan	36
D.. Lembaga Pemasyarakatan	37
E.. Pengacara atau Advokat	38
II.. Penegakan Hukum	41
II.7. Lembaga Peradilan	48
II.8. Penyelidikan dan Penyidikan	49
1.. Penyelidikan	50
1.1.. Fungsi dan Wewenang Berdasar Hukum.....	50
1.2.. Kewenangan Berdasar Perintah Penyidik	52
1.3.. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan	52
2.. Penyidikan	53

BAB III. METODE PENELITIAN	60
III.1. Tipe Penelitian	60
III.2.Sifat Penelitian	60
III.3.Sumber Data	72
III.4.Metode Pengumpulan Data	73
III.5.Metode Analisis Data	73
BAB IV. PEMBAHASAN	74
IV.1Praperadilan sebelum Lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	74
IV.2Praperadilan Setelah Lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	75
A.Kasus Posisi	85
B.Pembahasan	97
C.Putusan Hakim	117
BAB V. PENUTUP	123
V.1.Simpulan	123
V.2.Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	